

**PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI (KMN) SEBAGAI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PETANI KARET  
DI KENAGARIAN TANJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi  
Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**Oleh :**

**HENDRA SETIAWAN  
97311 / 2009**

**PROGRAM STUDI**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2014**

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

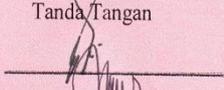
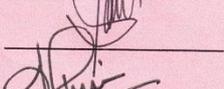
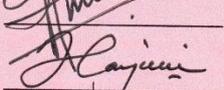
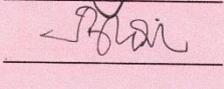
Pada hari Kamis, 27 Februari 2014 Pukul 12.00 s/d 14.00 WIB

**Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN)  
Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Petani Karet  
Di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung**

Nama : Hendra Setiawan  
TM/NIM : 2009/97311  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Februari 2014

**Tim Penguji :**

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Dasril, M.Ag	
Sekretaris : Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D	
Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D	
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Anggota : Adil Mubarak, S.IP. M.Si	

Mengesahkan:  
Dekan FJS UNP  
  
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 196210011989031002

## ABSTRAK

**HENDRA SETIAWAN, 2009/97311: Pelaksanaan Program Kredit Mikro  
Nagari (KMN) Sebagai Program Pemberdayaan  
Masyarakat Miskin Petani Karet di Kenagarian  
Tanjung Kabupaten Sijunjung**

Program Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam rangka implementasi agenda pembangunan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan program KMN di Kenagarian Tanjung. Adapun permasalahan tersebut adalah macetnya dari pelaksanaan KMN. Hal ini terjadi karena banyaknya dari masyarakat kelompok penerima yang terlambat dan menunggak dalam pengembalian dana, sehingga untuk penyaluran dana tahap lanjut menjadi terhambat. Kemudian juga dari segi pemanfaatan dana yang sebelumnya ditujukan untuk membantu dalam mendukung peningkatan modal usaha, tetapi banyak dari masyarakat khususnya kelompok masyarakat petani karet yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kebutuhan diluar kepentingan berusaha. Sehingga menjadikan kurang terlihatnya kontribusi KMN bagi masyarakat khususnya masyarakat petani karet di Kenagarian Tanjung.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang sebenarnya. Informan penelitian ditentukan dengan memakai teknik *purposive sampling*. Jenis datanya terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan program KMN di Kenagarian Tanjung belum terlaksana dengan baik. Seperti masih adanya kendala-kendala yang timbul dari masyarakat khususnya kelompok masyarakat petani karet yang menunggak dalam pengembalian pinjaman, serta pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dari KMN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari program KMN bagi masyarakat miskin petani karet belum tercapai dengan maksimal. Untuk itu diperlukan perbaikan dari semua pihak terkait, guna kelancaran pelaksanaan program KMN untuk kedepannya. Kemudian dalam penseleksian dan verifikasi kelompok penerima terutama dengan jenis usaha petani karet lebih diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar mempunyai kemauan dalam berusaha agar nantinya permasalahan serupa tidak terjadi untuk periode selanjutnya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari (KMN) Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Petani Karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung”**. Dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Politik yang telah membantu terselenggaranya urusan administratif penyelesaian skripsi.
3. Bapak Dr. Dasril, M.Ag dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai pembimbing I dan II yang penuh ketulusan dan kesabaran serta kesediaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan mereka, untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D, Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Bapak Zikri Alhadi S.IP. MA selaku dosen penguji yang telah memberikan sumbangan pemikiran berupa saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Teman-teman angkatan 2009 Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT membalas segala bentuk bantuan diatas dengan pahala yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal ‘Alamin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

Padang, Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	13
2. Konsep kemiskinan .....	16
3. Kredit Mikro Nagari (KMN).....	21
4. Indikator Kemiskinan Pada Petani Karet .....	29
B. Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi penelitian .....	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	37

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Alat Pengumpulan Data .....	39
G. Uji Keabsahan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus.....	47
C. Pembahasan.....	82

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpul Data .....	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kenagarian Tanjung .....	45
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kenagarian Tanjung .....	46
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk di Kenagarian Tanjung .....	46
Tabel 4.4 Daftar Nama Pengelola Pokja .....	49
Tabel 4.5 Nama Kelompok Jenis Usaha Petani Karet .....	70
Tabel 4.6 Daftar Kelompok Petani Karet Menunggak.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	34
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks pembangunan di dunia ketiga, fenomena kemiskinan merupakan salah satu isu sentral dan pada gilirannya melahirkan berbagai perspektif pemikiran dalam mengkaji fenomena kemiskinan tersebut. Namun kemiskinan tetap eksis dalam proses pembangunan di dunia ketiga, bahkan di negara maju pun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan walaupun dengan aksentuasi permasalahannya berbeda-beda di antara ke dua kawasan tersebut. Indonesia sebagai bagian dari negara dunia ketiga, dalam sejarah dan proses pembangunan belum pernah bebas dari kemiskinan, walau secara moral dan konstitusional bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dari sudut ekonomi, sosial, dan politik sesuai dengan sila kelima dari Pancasila dan pasal 34 UUD Republik Indonesia (Muslim, 2006 : 26)

Menurut Suharto (dalam Ismail Nawawi, 2009 : 120), kemiskinan merupakan konsep dan fenomena bermatra multidimensional yang memiliki ciri-ciri seperti 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan); 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi); 3) Ketiadaan jaminan masa depan; 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal; 5) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat; 6) Ketiadaan

akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian; 7) mengalami cacat fisik dan mental, dan 8) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Sedangkan menurut Siagian (2005: 80) kemiskinan pada negara–negara terbelakang dihadapkan pada lingkaran setan yang mengandung komponen pendapatan perkapita yang rendah yang berakibat ketidakmampuan menabung yang pada gilirannya tidak terjadi pembentukan modal (*no captial formation*) sehingga tidak ada investasi. Jika tidak ada investasi maka tidak terjadinya perluasan usaha berarti makin sempitnya perluasan kerja. Sempitnya perluasan kerja berarti semakin tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran berarti tidak ada penghasilan berarti pada titik bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Melihat kemiskinan di Sumatera Barat, tingkat kemiskinan masyarakat di Sumatera Barat menurun rata-rata 0,65 persen per tahun dalam periode 2010 hingga 2012. Dengan tingkat penurunan rata-rata tersebut, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menurun dari 9,5 persen pada Maret 2010 menjadi 8,19 persen. Pada Maret 2010 tingkat kemiskinan Sumbar mencapai 9,5 persen lalu dapat diturunkan menjadi 9,45 persen pada Maret 2011 atau menurun 0,5 persen. Sedangkan di tingkat Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang masih tertinggal bersama tujuh daerah lainnya di Sumbar dan 182 daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sijunjung berpenduduk 205.542 jiwa. Dari jumlah itu 10 persennya masuk dalam kategori penduduk miskin. Angka ini masih di bawah rata-rata Sumbar (8,19 persen). Meski naik

dari 5,6 persen di tahun 2010 menjadi 5,7 persen setahun kemudian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Sijunjung tidak berbanding lurus dengan naiknya kesejahteraan masyarakat (BPS, 2011).

Dalam upaya mengatasi dan memecahkan masalah kemiskinan banyak para pakar dan ahli mengungkapkan berbagai pendapat dan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Suharto (2005) mengungkapkan bahwa strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Namun, karena tugas-tugas kehidupan dan status pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan "*person – in - enviroment* dan *person – in - situation*". Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan di dasari pada dua pendekatan ini antara lain :

- 1) Pemberian bantuan sosial dan rehabilitas sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial
- 2) Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial
- 3) Program pemberdayaan masyarakat.

Meskipun berbagai macam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun dalam rangka peningkatan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan untuk menggerakkan perekonomian keluarga miskin, maka perlu dilakukan intervensi terhadap keluarga miskin dengan menyediakan kredit mikro sebagai tambahan modal usaha. Kredit mikro atau yang disebut dalam program Gubernur Sumatera Barat dengan Kredit Mikro Nagari merupakan bagian penting dari

penanggulangan kemiskinan yang belum disentuh dengan pendekatan modal sosial nagari oleh program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Program Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam rangka implementasi agenda pembangunan, Salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang dilakukan pemerintah Provinsi adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin melalui penyediaan Kredit Mikro Nagari (KMN) sebagai tambahan modal usaha.

Kredit Mikro Nagari sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disalurkan kepada nagari-nagari yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Program Kredit Mikro Nagari pertama digulirkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2007 dengan pendanaan yang dibantu oleh masing-masing pemerintahan Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Kredit Mikro Nagari dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Nagari/ desa yang akrab disebut dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Nagari. Sesuai Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 95/V/Sosbud/Bappeda/2009 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2009, menyatakan untuk penyaluran dan pengelolaan Kredit mikro nagari harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum sesuai aturan hukum yang ada.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Kredit Mikro

Nagari (KMN). Program KMN merupakan salah satu upaya dari Pemkab Sijunjung dan Pemprov Sumbar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Sumbar secara umum. Untuk program ini, pemerintah provinsi sudah menyiapkan dana sebesar Rp 6 miliar. Dana tersebut akan diberikan kepada nagari-nagari penerima di setiap kabupaten/kota. Setiap nagari mendapatkan dana sebesar Rp 300 juta. Kredit dengan bunga 1% ini menjadi aset bagi nagari penerima. Meskipun kredit itu menjadi dana abadi bagi nagari, namun nagari penerima diberikan wewenang untuk mengatur penyaluran kredit tersebut. Dana ini dihibahkan ke nagari penerima, namun penyalurannya diserahkan ke nagari penerima.

Berikut tabel jumlah nagari yang mendapatkan bantuan KMN mulai tahun 2007 sampai 2010 di Kabupaten Sijunjung :

NO	TAHUN	JUMLAH NAGARI
1	2007	8 Nagari
2	2008	8 Nagari
3	2009	20 Nagari
4	2010	19 Nagari

*Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sijunjung 2010*

Salah satu nagari di Kabupaten Sijunjung yang diberi kesempatan mendapat bantuan dari program KMN ini adalah Nagari Tanjung. Kenagarian ini terdiri dari 7 Jorong yaitu Jorong Kampung Juar, Jorong Koto Tanjung, Jorong Koto Tuo, Jorong Lumbaru, Jorong Tanjung Beringin, Jorong Taruko, dan Jorong Ujung Padang. Sebagian besar dari masyarakat di Nagari Tanjung merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena pada umumnya mata pencaharian masyarakat hanya mengandalkan dari hasil bertani saja, terutama petani karet.

Di antara nagari-nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung, Nagari Tanjung merupakan salah satu nagari yang memiliki tingkat kemiskinan penduduk cukup besar, sehingga tidak heran jika Nagari Tanjung dijadikan salah satu sasaran utama dalam program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan data yang didapat dari kantor Wali Nagari Tanjung, jumlah penduduk miskin di Nagari Tanjung mencapai 219 KK dari 1056 KK. Sebagian besar dari masyarakat di Nagari Tanjung merupakan bermata pencaharian sebagai petani terutama petani karet, karena di Nagari Tanjung merupakan salah satu Nagari yang mempunyai hutan karet cukup besar sekitar 2.027 hektar. Tetapi karena masih banyak kendala dalam produksinya, menjadikan petani karet kurang maksimal dalam mengolah lahan mereka. Dengan pinjaman kredit terbesar 20 juta perkelompok penerima, diharapkan agar masyarakat miskin petani karet dapat mempergunakan bantuan KMN tersebut dengan semestinya guna usaha karet mereka dapat berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai tanaman utama yang diusahakan, maka ketergantungan terhadap pendapatan dari hasil penjualan karet ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Meskipun Nagari Tanjung merupakan salah satu Nagari penghasil karet di Kabupaten Sijunjung, namun kenyataan menunjukkan tidak semua masyarakat petani karet hidup dalam kondisi yang lebih baik, banyak di antara mereka yang tergolong miskin. Disalurkannya bantuan Kredit Mikro Nagari ini kepada masyarakat miskin petani karet tidak lain ditujukan sebagai suntikan modal dalam mengembangkan usaha karet

milik mereka karena jika di tilik lebih lanjut, masyarakat miskin petani karet di Nagari Tanjung masih banyak menemui kendala-kendala dalam mengelola lahan karet milik mereka.

Seperti halnya yang telah di ungkapkan oleh Bapak Sudirman pada 19 Oktober 2013 selaku masyarakat petani karet, bahwa salah satu kendala utama yang ia alami dan oleh para petani karet setempat adalah keterbatasan modal yang mereka miliki. Ia kesulitan untuk meremajakan karet miliknya, karena banyaknya tanaman karet yang telah berusia tua dan sudah tidak produktif lagi. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas serta kualitas karet tersebut, yang tentunya juga akan berpengaruh pada besarnya tingkat pendapatan ia peroleh.

Bapak Saipul pada 19 Oktober 2013 selaku masyarakat petani karet juga menambahkan bahwa ia kesulitan untuk mendapatkan bibit karet unggul karena keterbatasan modal yang ia miliki. Ia menuturkan untuk pengelolaan karet secara berkelanjutan membutuhkan dana guna untuk membeli bibit karet yang baru, kemudian juga untuk membeli pupuk guna kesuburan pohon karet tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Defri Martoni selaku Wali Nagari Tanjung pada 21 Oktober 2013, bahwa masalah yang dihadapi petani karet saat ini adalah lemahnya kemampuan modal usaha untuk melakukan peremajaan tanaman karet. Petani pada umumnya sudah menyadari arti penting peremajaan tanaman karet, sayangnya mereka tidak mampu membeli bibit karet berkualitas unggul. Kondisi itu menyebabkan hasilnya juga

menurun. Sementara kemampuan Pemerintah untuk membantu petani, dalam hal pengadaan bibit karet, juga masih terbatas. Petani karet di Nagari Tanjung itu sebagian tergolong kaum ekonomi lemah yang tidak punya dana untuk meremajakan tanaman karet mereka yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Dengan kondisi pohon seperti itu, penghasilannya relatif kecil. Tingkat produksi karetnya antara 450-5000 kg per ha/tahun, menyulitkan mereka untuk membeli bibit klon unggul yang dibutuhkan untuk peremajaan tanaman mereka selama ini. Sehingga dengan adanya bantuan KMN ini khususnya bagi masyarakat miskin petani karet di Nagari Tanjung diharapkan dapat membantu dalam menambah modal usaha guna mengelola usaha karet milik mereka dan meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam implementasi program Kredit Mikro Nagari (KMN) ini khususnya di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung ditemukan berbagai macam permasalahan. Berdasarkan wawancara pada observasi awal dengan Bapak Ajisman selaku ketua POKJA yang mengurus KMN di Kenagarian Tanjung pada tanggal 26 Februari 2013, terungkap bahwa permasalahan yang mendasar adalah macetnya dari pelaksanaan KMN. Ini dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang terlambat bahkan menunggak untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan melalui program Kredit Mikro Nagari tersebut. Sehingga untuk penyaluran dana tahap lanjut menjadi terhambat, karena diketahui bahwa bantuan Kredit Mikro Nagari ini disalurkan secara bergulir kepada masyarakat.

Kemudian juga dari segi pemanfaatan dana yang sebelumnya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendukung peningkatan modal usaha, tetapi masih banyak dari sebagian masyarakat yang menggunakannya untuk kebutuhan lain. Berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan Bapak Junaidi selaku masyarakat petani karet yang menerima bantuan KMN, bahwa ia sebagai penerima KMN belum merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Karena ia mengakui bahwa sebagian dana bantuan tersebut tidak ia pergunakan dengan semestinya. Padahal bantuan ini seharusnya dipergunakan untuk kepentingan berusaha, namun ia menggunakannya untuk kebutuhan lainnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa masyarakat belum mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan dana bantuan yang mereka peroleh untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Sehingga dari beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KMN di Kenagarian Tanjung, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program ini belum terlaksana dengan semestinya. Hal ini dibenarkan oleh ketua POKJA KMN yang mengungkapkan bahwa karena adanya kendala-kendala tersebut, menjadikan pelaksanaan program ini kurang maksimal dan belum mampu mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat miskin masih bisa dikategorikan belum bisa berubah ke taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk mengungkapkannya melalui judul skripsi **“Pelaksanaan Program Kredit**

## **Mikro Nagari (KMN) Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Petani Karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung”.**

### **B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan penulis diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih kurang lancarnya pelaksanaan penyaluran program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang terlambat dan menunggak untuk mengembalikan peminjaman dana KMN yang telah digunakan masyarakat, sehingga terjadi kemacetan penyaluran dana tahap lanjut di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dari dana Kredit Mikro Nagari (KMN) oleh masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung.
- d. Belum terlaksananya tujuan dari program Kredit Mikro Nagari (KMN) terhadap usaha pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung.

#### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan dapat mempertajam objek pembahasan, maka masalah ini di batasi pada pelaksanaan dan kontribusi program Kredit Mikro Nagari untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten

Sijunjung dan kendala-kendala dalam pelaksanaan program KMN serta upaya pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan dan kontribusi Program Kredit Mikro Nagari untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung?
- b. Apakah kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung?
- c. Bagaimana upaya-upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari dalam pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagaraan Tanjung Kabupaten Sijunjung
3. Mendeskripsikan upaya-upaya yang di lakukan pemerintah dalam mengatasi kendala kendala dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari dalam pemberdayaan masyarakat miskin petani karet di Kenagarian Tanjung Kabupaten Sijunjung

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Sebagai sumbangan pada pendekatan ilmu pengetahuan dalam Adminsitasi Negara terutama yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat

##### **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta sebagai masukan informasi bagi pemerintah dalam merencanakan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih baik di masa mendatang, terutama bagi masyarakat miskin petani karet.
- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat atas segala hasil yang penulis dapatkan berkenaan dengan program Kredit Mikro Nagari.
- c. Bagi penulis, untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara sederhana pemberdayaan menurut bahasa adalah suatu proses, cara, atau perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Sedangkan secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Edi Suharto (2005: 59) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti yaitu sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Kemudian sebagai tujuan maksudnya adalah pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya tidak hanya ditujukan secara individual, akan tetapi juga secara kolektif (*individual self empowerment* maupun *collective self empowerment*), sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia, dengan demikian “manusia” dijadikan sebagai tolak ukur normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga dan masyarakat bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karenanya dalam pemberdayaan masyarakat perlu pengenalan akan hakekat manusia yang diharapkan dapat memberi sumbangan ataupun menambah wawasan ketika menerapkan konsep atau program pada masyarakat (Roesmidi, 2006 : 16)

Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan, menurut Ambar (dalam Muslim Kasim, 2006 : 153), adalah untuk membentuk individu dan kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa sesungguhnya yang dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat itu sendiri merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

Rubin (dalam Sumaryadi, 2005 : 94) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya
- b. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan
- c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik
- d. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun dari sumber-sumber lainnya
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro

Dengan dapat terlaksananya dari prinsip pemberdayaan masyarakat, diharapkan dari pemerintah dapat menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan pada setiap lapisan masyarakat. Dari masyarakat itu sendiri juga diharapkan memiliki

budaya yang proaktif untuk kemajuan bersama, mengenal diri dan lingkungannya serta memiliki sikap bertanggung jawab dan memposisikan dirinya sebagai subjek dalam upaya pembangunan di lingkungannya.

Kemudian ada beberapa indikator yang menyatakan suatu masyarakat telah berdaya, indikator tersebut yaitu (a) mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada dimasyarakat, (b) dapat berjalannya “*bottom up planning*”, (c) kemampuan dan aktivitas ekonomi, (d) kemampuan menyiapkan masa depan keluarga, (e) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. (Suhendra, 2006 : 43).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara atau proses untuk mendorong individu atau sekelompok orang untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian dari masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Selain itu juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap kaum lemah (Edi Suharto, 2005).

## **2. Konsep Kemiskinan**

Menurut data statistik, masih sangat banyak anggota masyarakat yang hidup dalam jeratan kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin

tinggal di pedesaan yang mengandalkan usaha buruh tani sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat pedesaan yang kehidupan sehari-harinya mengandalkan sektor pertanian, tentunya dalam kehidupannya sangat tergantung dan berhubungan erat dengan masalah pertanahan. Bagi petani dipedesaan, masalah tanah merupakan mati atau hidup mereka. Meskipun dipedesaan ada pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki tanah, biasanya sebagai petani penggarap atau buruh tani, namun mereka hanya mendapatkan pekerjaan sewaktu waktu saja, sehingga penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Muslim : 2006).

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang jasa lainnya (BPS dan DEPSOS, 2002)

Sedangkan menurut Friedman (dalam Muslim Kasim, 2006 : 47) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan untuk mengkumulasikan basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) : modal yang produktif atau asset, sumber-sumber

keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain, dan yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

Menurut Edi Soeharto (2005) kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun kelompok
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan pencaharian yang berkesinambungan
- h. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, janda miskin, kelompok marjinal, dll)

Selain itu kemiskinan menurut Ambar (2004) juga dibedakan atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural:

- a. Kemiskinan natural disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi oleh suatu komunitas, sehingga sulit untuk melakukan perubahan, umumnya keterbatasan tersebut berupa kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang buruk, sehingga tidak menyediakan fasilitas bagi komunitas sekitarnya.
- b. Kemiskinan cultural adalah kondisi miskin yang dihadapi oleh suatu komunitas ,yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup dan diyakini dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri.
- c. Kemiskinan struktural merupakan masyarakat suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun oleh manusia. Apa yang yang dibangun oleh manusia kadang kadang hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak lain, seperti penguasaan faktor produksi yang tidak merata.

Menurut DEPSOS RI (2005) dalam Muslim Kasim (2006), ada dua kategori faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

- 1) Faktor Internal

Faktor-faktor internal (dari dalam diri individu atau keluarga penduduk miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain berupa kekurangmampuan dalam hal :

- a) Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)
- b) Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi)
- c) Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, tempramental)
- d) Spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin)
- e) Sosial psikologis (kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan)
- f) Keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja)
- g) Asset (misalnya tidak mempunyai stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja)

## 2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor Eksternal (berada diluar dari individu atau keluarga penduduk miskin).

- a) Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- b) Tidak terlindunginya hak-hak atas kepemilikan tanah
- c) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- d) Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- e) Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat

- f) Sistem mobilitas dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal
- g) Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural
- h) Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
- i) Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- j) Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- k) Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- l) Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

### **3. Kredit Mikro Nagari (KMN)**

Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Meskipun berbagai macam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan namun dalam rangka peningkatan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan untuk mengerakkan perekonomian keluarga miskin maka perlu dilakukan intervensi terhadap keluarga miskin dengan menyediakan Kredit Mikro Nagari (KMN) sebagai tambahan modal usaha. Dengan demikian, Kredit Mikro Nagari merupakan bagian penting dari penanggulangan kemiskinan lainnya.

Program Kredit Mikro Nagari pertama digulirkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2007 dan disalurkan kepada Nagari-Nagari yang ada di wilayah Sumatera Barat.

**a) Pengertian dan Tujuan Kredit Mikro Nagari (KMN)**

Program Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan bentuk kerja sama dan koordinasi antara pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kredit Mikro Nagari merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok keluarga miskin Nagari untuk mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, yang sekaligus meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang ada. Dengan Kredit Mikro Nagari ini masyarakat dapat lebih diberdayakan lagi dengan memupuk usaha-usaha mereka sendiri. Di nagari-nagari, penduduk miskin tidak seluruhnya miskin karena tidak punya usaha, tetapi banyak pula yang miskin karena mereka tidak punya modal. Dengan proyeksi Rp 300 juta setiap nagari, maka ada harapan selain mengasah semangat enterpreneur masyarakat juga untuk mendidik masyarakat mengelola keuangan nagari secara lebih profesional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 bahwa tujuan dari penyaluran Kredit Mikro Nagari adalah untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga

miskin ditingkat Nagari, agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari adalah untuk meningkatnya dan terciptanya perilaku positif bagi keluarga miskin dan stakeholders terkait, meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi, terselenggaranya sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan yang partisipatif, terwujudnya sinergitas program antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat/stakeholders, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Nagari, tumbuh dan berkembangnya pola hidup ber-Nagari di tengah-tengah masyarakat, terbangun dan meningkatnya kapasitas Nagari sebagai basis ketahanan masyarakat.

**b) Strategi yang digunakan dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari (KMN)**

Dalam implementasi penyaluran Kredit Mikro Nagari perlu adanya strategi yang digunakan agar nantinya suatu program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun strategi yang digunakan dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari Sebagai berikut :

- (1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Miskin baik penduduk laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh jaminan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Mendorong tumbuh dan berkembangnya

prakarsa dan partisipasi masyarakat serta terwujudnya kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas/pertanggungjawaban.

- (2). Pemberdayaan Masyarakat untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola potensi dan sumberdaya sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mendorong perekonomian yang berkelanjutan.
- (3). Peningkatan Kapasitas Nagari, peningkatan kemampuan Nagari sebagai unit Pemerintahan terdepan dan kesatuan masyarakat hukum Adat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan wilayah Nagari. Selain itu, meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat (BPD, LPM dan lembaga lainnya) dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan nagari.
- (4). Perluasan Kesempatan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan aksesibilitas permodalan yang murah dan mudah dengan jaminan sosial dari masyarakat dan institusi Nagari.
- (5). Peningkatan sinergitas program pembangunan oleh Pemerintah dalam konteks kewilayahan Nagari.
- (6). Pembentukan dan Pengembangan lembaga pengelola keuangan di Tingkat Nagari/Desa/Kelurahan.

**c) Pendekatan Operasional dalam Penyelenggaraan Kredit Mikro Nagari (KMN)**

Dalam pelaksanaan Kredit Mikro Nagari, ada beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan agar program ini tidak salah sasaran karena bantuan Kredit Mikro Nagari ini merupakan hak bagi seluruh masyarakat miskin. Pendekatan itu sebagai berikut :

- (1).Pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari dilakukan dengan bertumpu pada kelompok masyarakat (*Community Based Development*).
- (2).Penentuan kelompok, prioritas kegiatan serta jenis usaha diselenggarakan melalui mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) sesuai dengan karakteristik dan potensi sumberdaya lokal.
- (3).Pemberian kredit permodalan diprioritaskan bagi masyarakat/kelompok masyarakat miskin yang telah dan sedang berusaha dalam skala kecil dan mikro.
- (4).Penyaluran Kredit Mikro Nagari dilaksanakan melalui sistem bergulir dan bergilir dalam rangka memperluas capaian kelompok sasaran keluarga miskin yang ada di Nagari.
- (5).Optimalisasi peranan kelompok kerja, tenaga pendamping, pejabat pemerintah dan LSM dalam pengelola kredit mikro nagari.

(6).Pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga keuangan lokal (BPR, LPN, Baitul Mal) sebagai lembaga pengelolaan keuangan kredit mikro Nagari.

(7).Peningkatan peran dan fungsi ninik mamak, bundo kandung, alim ulama, tokoh masyarakat dan perantau dalam pengembangan jaminan sosial.

Sesuai dengan surat edaran Gubernur Sumatera barat Nomor 95/V/Sosbud/Bappeda/2009 tentang petunjuk teknis Kredit mikro Nagari Tahun 2009 telah di jelaskan berbagai aspek penting dalam menjalankan program Kredit Mikro Nagari, sebagaimana yang telah tersebut di atas seperti strategi yang akan digunakan serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan agar tujuan dari program Kredit Mikro Nagari tersebut dapat tercapai. Selanjutnya dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari ini tentunya juga memiliki prosedur-prosedur yang harus dilakukan guna mencapai keteraturan dalam pelaksanaannya sehingga tidak terjadi salah sasaran dalam penyalurannya. Seperti yang telah dijelaskan pada petunjuk teknis Kredit Mikro Nagari bahwa kriteria masyarakat yang berhak mendapat pinjaman modal bergulir dari Kredit Mikro Nagari adalah :

a) Penduduk Nagari setempat dan tidak pernah bermasalah dengan penggunaan modal bergulir dari program lainnya

- b) Rumah tangga miskin yang mempunyai usaha mikro/kecil baik secara individu maupun kelompok dengan prioritas bagi yang sudah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan modal
- c) Kelompok/individu yang berkategori keluarga miskin yang dianggap memiliki kemauan dan kemampuan berusaha
- d) Mempunyai tanggungan jumlah keluarga yang besar
- e) Penggunaan dana pinjaman permodalan ini diperuntukkan bagi penambahan modal, pengadaan, bahan baku produksi sesuai dengan kebutuhan

Bidang usaha yang di bantu dan di fasilitasi oleh Kredit Mikro Nagari ini juga disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terdapat di Nagari. Dengan begitu seluruh masyarakat miskin di seluruh Nagari yang mempunyai keterbatasan modal dalam usahanya dapat terbantu guna meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Sedangkan komponen kegiatan yang dibantu atau difasilitasi dengan program Kredit Mikro Nagari adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi rumah tangga miskin yang ada pada Nagari
- b) Kegiatan pendukung pelaksanaan Kredit Mikro Nagari, antara lain kegiatan penyusunan perencanaan kredit mikro Nagari, pembinaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran Kredit Mikro Nagari.

- c) Kegiatan operasional nagari untuk menunjang pengelolaan Kredit Mikro dan kegiatan pemerintahan di tingkat Nagari.
- d) Kredit Mikro Nagari tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan sarana/dan prasarana dan kegiatan sosial lainnya.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana dari program Kredit Mikro Nagari dilakukan melalui lembaga keuangan Nagari. Kemudian pencairan dana dilakukan oleh ketua POKJA Nagari (Kelompok Kerja) setelah mendapat informasi bahwa dana dapat dicairkan melalui Bank/Lembaga yang telah ditunjuk dan di kirim mealalui nomor rekening ketua POKJA Nagari yang selanjutnya disalurkan kepada calon penerima pinjaman Kredit Mikro Nagari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan Kredit Mikro Nagari ini merupakan suatu program yang dirancang khusus oleh pemerintah Sumatera Barat guna mengurangi angka kemiskinan melalui bantuan materi/dana yang ditujukan sebagai stimulasi modal usaha dalam menggerakkan perekonomian masyarakat yang kekurangan modal dalam usahanya. Dalam pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari ini juga melalui aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari yang telah dikeluarkan dalam surat edaran Gubernur Sumatera Barat guna tercapainya keteraturan dalam pelaksanaan dari program tersebut.

#### 4. Indikator Kemiskinan pada Petani Karet

Masih banyaknya petani yang tergolong miskin di Indonesia menjadikan pemerintah banyak melakukan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan kepada para petani. Hal ini dilakukan pemerintah karena adanya kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin dan pada umumnya menggantungkan hidupnya dari kemurahan alam di sektor pertanian. Seperti halnya tanaman karet yang sebagian besar oleh rakyat Indonesia dijadikan sebagai sumber pendapatan utama bagi kalangsungan kehidupannya.

Karet merupakan salah satu komoditi penting bagi Negara Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, maupun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bagi rakyat indonesia. Namun sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua terbesar dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas (91%) areal karet nasional dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah (*crumb rubber*). Rendahnya produktivitas karet rakyat disebabkan oleh banyaknya areal tua, rusak, dan tidak produktif, penggunaan bibit bukan klon unggul serta kondisi lahan yang menyerupai hutan (Departemen Pertanian, 2007).

Komoditi karet memang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara Indonesia, namun masih dapat

dikatakan sebagian besar petani karet di Indonesia masih berada pada garis kemiskinan jika diukur dengan standar Bank dunia dengan batas garis kemiskinan untuk negara yang sedang berkembang. Dudi Iskandar (2011: 167), salah satu yang menjadi kendala dalam peningkatan produktivitas karet oleh para petani adalah :

a) Modal

Penggunaan bibit unggul untuk klon karet sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal. Para petani kesulitan menanam klon karet unggul karena mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan modal. Hal ini disebabkan oleh pembangunan kebun karet unggul memerlukan biaya yang cukup tinggi jika dibanding dengan membangun atau menanam karet tradisional/bibit lokal.

b) Lahan

Ketersediaan lahan mempunyai peranan yang sangat penting menyangkut keputusan petani untuk mengadopsi dan menggunakan bibit unggul karet. Keterbatasan lahan menyebabkan petani memutuskan untuk tidak menanam karet unggul. Keterbatasan lahan sangat membatasi petani untuk mengembangkan karet dengan menggunakan bibit unggul. Untuk membuka atau menanam karet unggul, petani harus memiliki karet lahan produktif yang digunakan untuk menghidupi diri dan keluarganya selama masa tunggu atau masa dimana karet sedang mengalami pertumbuhan dan belum menghasilkan.

Departemen Pertanian (2007) secara umum masalah usahatani karet yang dihadapi petani di Indonesia adalah keterbatasan modal baik untuk membeli bibit unggul maupun sarana produksi lain seperti herbisida dan pupuk. Selain itu ketersediaan sarana produksi pertanian tersebut ditingkat petani juga masih terbatas. Bahan tanam karet unggul yang terjamin mutunya hanya tersedia di balai penelitian atau para penangkar benih binaan melalui sistem waralaba di sentra-sentra pembibitan yang juga masih terbatas jumlahnya.

Rendahnya tingkat produktifitas serta kualitas dari tanaman karet sangat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh para petani karet di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini tentunya akan menambah daftar kemiskinan yang terjadi di tingkat para petani di Indonesia, terutama pada petani karet. Karena memang tidak sedikit dari penduduk di Indonesia sangat bergantung dari usahatani karet ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas petani karet sangat di pengaruhi oleh ketersediaan modal yang mereka miliki. Modal sangat penting peranannya dalam usahatani karet yang mereka jalankan. Dengan modal yang memadai tentunya dapat membantu para petani dalam menggarap lahan mereka, baik dari segi kebutuhan lahan ataupun tanaman karet yang mereka usahakan. Jika hal ini dapat teratasi oleh pemerintah, bukan tidak mungkin produktivitas karet di Indonesia

akan semakin meningkat dan mensejahterakan para petani terutama bagi para petani karet di Indonesia, dengan begitu secara tidak langsung angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan, selain itu tentunya juga akan menambah devisa bagi Negara Indonesia.

## **B. Kerangka Konseptual**

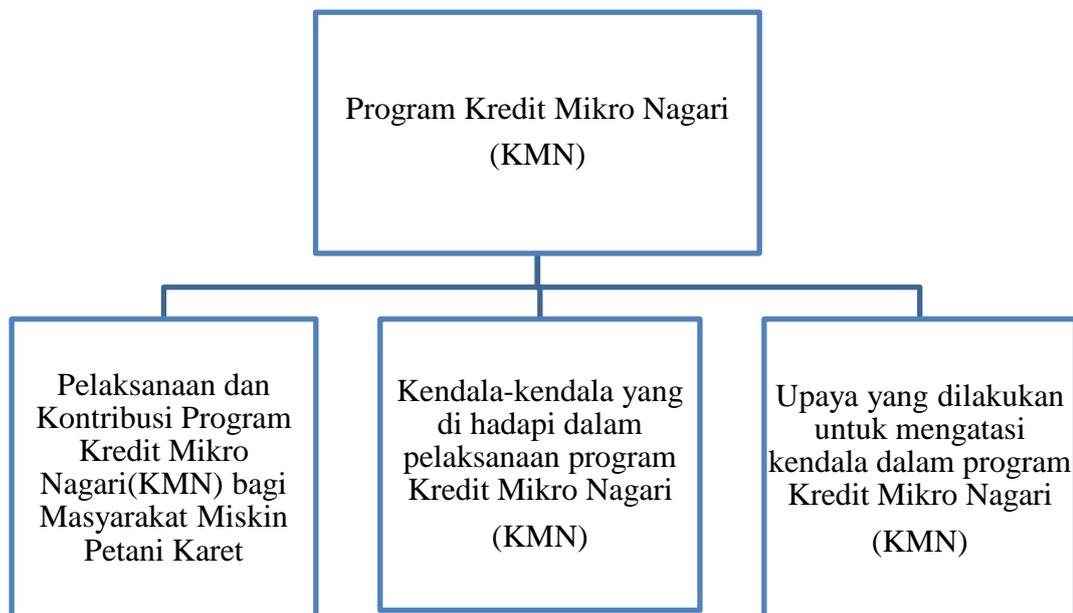
Program Kredit Mikro Nagari (KMN) merupakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan didanai oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih saja ada masyarakat yang belum mengetahui arti dan tujuan program tersebut. Hal ini bisa saja kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap Program Kredit Mikro Nagari (KMN) itu sendiri yang masih kurang.

Berangkat dari masalah tersebut, perlu kiranya pemerintah melakukan revisi kembali pelaksanaan Kredit Mikro Nagari (KMN) baik dalam hal sosialisasi, pelaksanaan maupun manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat melalui program tersebut. Apabila aparat pemerintah telah memahami hal tersebut, maka dalam pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari nantinya akan didapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar

belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Skema 2.1  
Kerangka Konseptual



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Kredit Mikro Nagari (KMN) di Nagari Tanjung Kabupaten Sijunjung diawali dengan tahap persiapan dengan membentuk POKJA KMN sebagai pengurus dan pengelola KMN yang diputuskan oleh Wali Nagari beserta Lembaga Nagari (BAMUS). Kemudian berlanjut ketahap perencanaan yang akan dilakukan oleh POKJA menyangkut identifikasi dan verifikasi pada setiap calon kelompok penerima. Selanjutnya ketahap pencairan dana yang akan dilakukan oleh POKJA melalui BPR ke rekening masing-masing kelompok penerima yang telah lolos verifikasi. Setelah dana tersalurkan, maka akan ada tahap pemantauan dari pihak Nagari melalui BPN untuk melihat sejauh mana tingkat perkembangan dari usaha yang mereka jalankan. Kemudian terakhir pada tahap pelaporan, POKJA selaku pengurus dari jalannya program KMN berkewajiban mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program KMN yang telah berjalan satu tahun buku.
2. Didalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kredit Mikro Nagari (KMN) terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi pada tahap implementasi kebijakan. Pada

tahap perencanaan, pencairan dana dan pelaporan dapat dikatakan telah sesuai prosedur dan fungsinya, namun pada tahap perencanaan, kinerja POKJA dinilai masih kurang karena pada verifikasi kelompok belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, masih banyak kelompok penerima yang belum memenuhi kriteria sehingga berdampak pada banyaknya kelompok masyarakat yang menunggak dalam pengembalian dana. Kemudian juga dalam tahap pemantauan, aparat pelaksana dinilai masih kurang maksimal dalam memantau masyarakat, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat penerima khususnya masyarakat petani karet yang tidak memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan berusaha.

3. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas pelaksana kegiatan program Kredit Mikro Nagari melalui musyawarah nagari yang telah dilakukan berkeputusan bahwa untuk sementara waktu penyaluran dana dihentikan sampai permasalahan dapat terselesaikan, dengan catatan untuk kelompok yang benar-benar bermasalah dalam pengembalian dana, untuk periode selanjutnya tidak akan mendapatkan bantuan dana lagi. Kemudian dalam hal pemanfaatan dana yang pada umumnya banyak disalahgunakan oleh kelompok masyarakat khususnya petani karet, untuk kedepannya akan dilakukan pendekatan- pendekatan secara personal kepada kelompok tersebut guna memberikan arahan bagaimana cara pemanfaatan dana yang baik. Selain itu akan lebih ditingkatkan lagi dari peran petugas-petugas pelaksana kegiatan baik dari segi sosialisasi,

verifikasi pada setiap kelompok calon penerima KMN maupun dalam pemantauan secara langsung kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan pada pelaksanaan program KMN sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin di Nagari Tanjung Kabupaten Sijunjung, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Nagari, diharapkan agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, khususnya bagi aparat pelaksana agar lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan fungsi masing-masing dan lebih tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta lebih bisa mengoptimalkan terhadap potensi usaha yang ada dimasyarakat demi mensejahterakan mereka sesuai dengan tujuan utama dari pelaksanaan program KMN.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat petani karet yang mendapatkan bantuan dana KMN, diharapkan dapat memanfaatkan dana dengan semaksimal mungkin agar manfaat dari KMN ini dapat mereka rasakan, serta memiliki rasa tanggungjawab sebagai peminjam sehingga tidak terjadi permasalahan yang sebelum-sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media
- Burhan Bungin. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*. Jakarta: BPS
- BPS/Badan Pusat Statistik. 2011. *Sijunjung Dalam Angka 2011*. Sijunjung : BPS
- Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Pertanian. 2007. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Karet, Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka
- Dudi Iskandar. 2011. *Penggunaan Bibit Karet Unggul oleh Petani Karet, Motivasi dan Hambatan*. Jakarta : Pusat Teknologi Produksi Pertanian
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Lexy J. Muleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nasir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta
- Muslim Kasim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: PT Indo Media Global
- Milles, B. Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Ismail Nawawi. 2009. *Pembangunan dan Problematika Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara
- Prijono, Onny S, dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan (konsep, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: CSIS

- Roesmidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat Sumedang* : Alqaprint Jatinangor
- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

### **Peraturan**

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 95/V/Sosbud/Bappeda/2009 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2009

UU No 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari (KMN) Kabupaten Sijunjung

Peraturan Bupati Sijunjung No. 11 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Mikro Nagari (KMN) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009

Peraturan Nagari Tanjung No. 2 Tahun 2009 tentang Kredit Mikro Nagari Tanjung (KMN) Kecamatan Koto VII